



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL MANADO
2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN	8
1. Latar Belakang	8
2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
3. Peran Strategis KPKNL Manado	12
4. Sistematika Laporan	14
5. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
1. Perencanaan Strategis	20
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
1. Capaian Kinerja Organisasi	32
2. Realisasi Anggaran	47
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
4. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	51
BAB IV PENUTUP	55



Adi Suranto

Kepala KPKNL Manado

KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas kinerja kantor-kantor pemerintahan yang lebih baik dan terukur, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah terpadu untuk memenuhi perkembangan dan tuntutan tersebut. Langkah-langkah tersebut diwujudkan dalam perencanaan strategi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sehingga dapat berjalan sistematis, terprogram dan berkelanjutan yang pada tahapan selanjutnya pelaksanaan atas rencana diukur tingkat keberhasilannya. Salah satu pengukuran atas tingkat keberhasilan kinerja diwujudkan dalam sistem akuntabilitas kinerja dengan bentuk Laporan Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran dilakukan atas capaian kinerja KPKNL Manado sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, KPKNL Manado mengimplementasikan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 yaitu "Menjadi Pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan".

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Setiap upaya pencapaian visi dan misi DJKN, serta pelaksanaan strategi organisasi, KPKNL Manado senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan nilai-nilai (*core values*) Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, berorientasi hasil, serta memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Manado telah menerapkan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai salah satu instrumen manajemen kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Implementasi tersebut diwujudkan melalui penetapan Kontrak Kinerja pada level Kemenkeu-Three, yang selanjutnya dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai bidang tugasnya dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai bentuk penjabaran sasaran strategis organisasi pada Tahun 2025, sehingga setiap program dan kegiatan dapat terukur serta selaras dengan target kinerja organisasi.

KPKNL Manado berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, capaian KPKNL Manado mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kontribusi seluruh sumber daya yang ada di KPKNL Manado. Setiap pegawai diharapkan senantiasa memberikan kinerja terbaik guna memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan masyarakat yang semakin tinggi

terhadap kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja tersebut, KPKNL Manado secara konsisten melakukan penyempurnaan di berbagai aspek pelaksanaan tugas. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui peningkatan pendidikan formal, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial, serta pembentukan tim kerja untuk menangani program atau sasaran strategis tertentu secara lebih fokus dan efektif.

Selain itu, penguatan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan kinerja juga terus dilakukan guna mendukung proses kerja yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Pengembangan sistem informasi ini berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi SDM sehingga pelaksanaan tugas dapat menghasilkan kinerja yang semakin optimal dari waktu ke waktu.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta penyediaan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 KPKNL Manado dapat tersusun dengan baik.


Laporan Kinerja Tahun 2025 KPKNL Manado merupakan cerminan dari setiap langkah, proses, dan hasil pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memastikan pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif, dengan tetap berfokus pada sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan gambaran kinerja organisasi secara jelas dan transparan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Manado, 18 Februari 2026
Kepala KPKNL Manado



Ditandatangani secara elektronik
Adi Suranto



Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

An illustration of two hands in blue, one holding a yellow scroll with a green band and a small green pentagon. The background is orange and blue.

01.

Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
3. Peran Strategis KPKNL Manado
4. Sistematika Laporan
5. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu wujud implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang memuat berbagai capaian pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan penilaian, serta pelayanan lelang yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan.

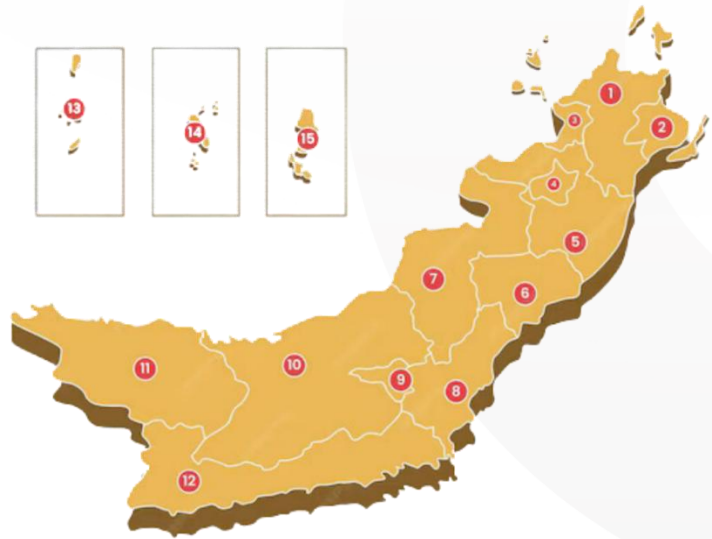
Melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, diharapkan tercipta tata kelola organisasi yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara eksternal, laporan ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan. Secara internal, laporan ini menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi seluruh jajaran KPKNL Manado dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta menjawab tantangan tugas dan fungsi yang semakin kompleks di masa mendatang.

Penyusunan LKj KPKNL Manado Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, serta Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado merupakan unit operasional di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalu) yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon I dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPKNL Manado menempati lantai 4 Gedung Keuangan Negara (GKN), Jalan Bethesda No. 6-8, Sario, Kota Manado, dengan wilayah kerja meliputi 15 (lima belas) Kota/Kabupaten yaitu:

1. Kab. Minahasa Utara
2. Kota Bitung
3. Kota Manado
4. Kota Tomohon
5. Kab. Minahasa
6. Kab. Minahasa Tenggara
7. Kab. Minahasa Selatan
8. Kab. Bolaang Mongondow Timur
9. Kota Kotamobagu
10. Kab. Bolaang Mongondow
11. Kab. Bolaang Mongondow Utara
12. Kab. Bolaang Mongondow Selatan
13. Kab. Kepulauan Siao Tagulandang Biaro
14. Kab. Kepulauan Sangihe
15. Kab. Kepulauan Talaud



I. Tugas KPKNL Manado

Tugas pokok dan fungsi KPKNL Manado merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi operasional dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan Perpres Nomor 158 Tahun 2025 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, KPKNL Manado mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

II. Fungsi KPKNL Manado

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, KPKNL Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

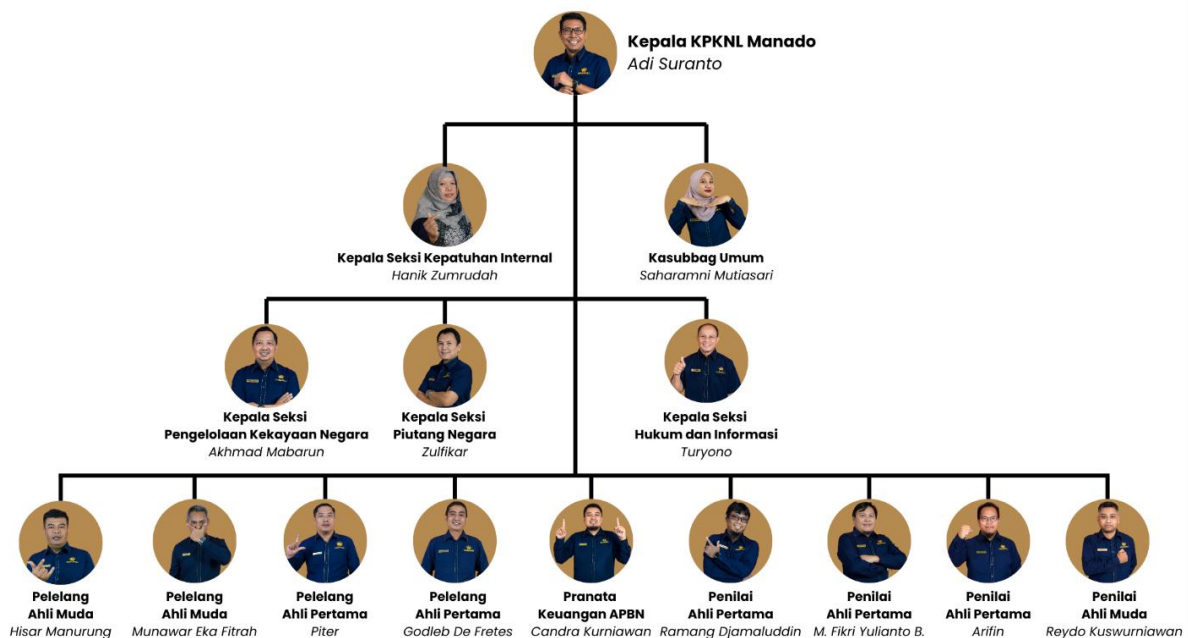
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

III. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPKNL terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Seksi Piutang Negara;
4. Seksi Hukum dan Informasi;
5. Seksi Kepatuhan Internal; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi KPKNL Manado dapat terlihat dalam bagan di bawah ini:



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL didukung adanya sumber daya yang dimiliki yang merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan. Kekuatan sumber daya ini terbagi menjadi dua yaitu Sumber daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Fisik yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Kekuatan dari sisi sumber daya manusia terlihat dari ketersediaan personil dan kemampuan personil.

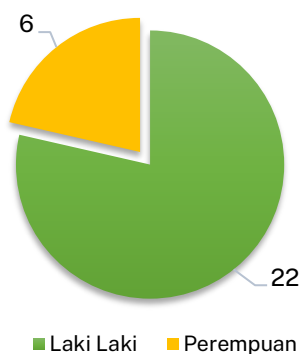
a. Ketersediaan personil

Ketersediaan personil merupakan jumlah ideal pegawai yang dapat melaksanakan tugas yang harus dikerjakan. Saat ini KPKNL Manado memiliki 28 (dua puluh delapan) sumber daya manusia, termasuk Kepala Kantor, yang siap untuk mengerjakan tugas- tugas operasional maupun tugas-tugas administratif yang akan mendukung pelaksanaan tugas operasional.

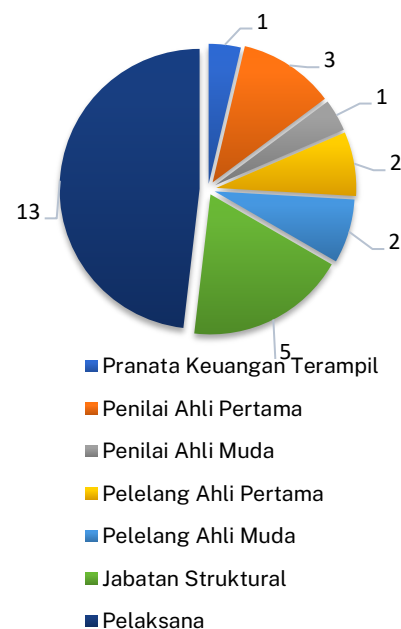
b. Kemampuan Personil

Kemampuan personil yang dimiliki oleh KPKNL Manado dapat dilihat golongan dan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Keahlian



2. Sarana dan prasarana fisik

Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh KPKNL Manado merupakan modal dan landasan yang penting untuk mendukung tercapainya visi dan misi instansi. Sarana dan prasarana penting yang secara langsung menunjang pelaksanaan tugas operasional KPKNL Manado terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Sarana dan prasarana fisik penunjang kegiatan administratif

Sarana dan prasarana fisik penunjang kegiatan administratif KPKNL Manado didukung oleh ketersediaan perangkat komputer yang memadai serta berfungsi dengan baik, sehingga mampu menunjang proses pengolahan data dan administrasi secara efektif dan efisien. Perangkat tersebut didistribusikan pada masing-masing seksi dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, beban kerja, dan kebutuhan operasional unit kerja.

Ketersediaan gedung kantor yang representatif, dilengkapi dengan ruang konsultasi, Area Pelayanan Terpadu (APT), serta ruang lelang, memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat pengguna jasa KPKNL. Fasilitas tersebut

memungkinkan terselenggaranya pelayanan yang tertib, nyaman, dan profesional.

Dukungan sarana fisik juga diperkuat dengan keberadaan gudang serta ruang penyimpanan arsip (rumah berkas) yang memadai. Fasilitas ini berperan penting dalam pengelolaan, pengamanan, dan penyimpanan dokumen maupun data strategis, sehingga setiap aktivitas dan hasil pelaksanaan tugas dapat terdokumentasi dengan baik dan akuntabel. Selain itu, terdapat 6 unit Rumah Negara dan 1 unit Mess yang disediakan untuk menunjang kebutuhan dari pegawai KPKNL Manado.

Secara keseluruhan, keberadaan gedung dan fasilitas pendukung tersebut turut menunjang kelancaran kinerja operasional dan administratif, sekaligus mencerminkan profesionalisme, kredibilitas, serta kewibawaan KPKNL Manado dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana fisik penunjang kegiatan operasional

Sarana dan prasarana fisik penunjang kegiatan operasional diwujudkan dalam bentuk tersedianya kendaraan dinas yang memadai yang dapat dioptimalkan untuk menjangkau wilayah operasional yang luas, baik kendaraan dinas roda empat maupun roda dua.

Perangkat-perangkat komputer yang tersedia yang dikhususkan untuk pengolahan data atau penyelesaian produk-produk hukum yang merupakan tugas operasional KPKNL Manado juga tersedia secara memadai sehingga untuk keperluan dan kebutuhan penunjang kegiatan operasional tidak perlu dikhawatirkan.

3. Peran Strategis KPKNL Manado

Setiap pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Manado membawa peran strategis tidak hanya bagi kepentingan pemerintah tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang dilayani. Kepentingan-kepentingan tersebut terwakili pada instansi-instansi pengguna jasa KPKNL (stakeholder) yang di antaranya adalah Para Satuan Kerja/Instansi Pemerintah yang ada di Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Penyerah Piutang yaitu Kementerian/Lembaga Pemerintah dan instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah serta masyarakat secara langsung yang memerlukan jasa pengurusan piutang negara dan lelang, pengguna jasa lelang dan yang lainnya.

Secara umum tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dapat dikelompokkan ke dalam dua tujuan, yaitu:

1. Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan
2. Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat strategi-strategi yang harus ditempuh, yaitu:

1. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel;

2. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara;
5. Meningkatkan penerimaan kembali dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
6. Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
7. Meningkatkan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang; dan
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

Oleh karena itu peran strategis yang dimiliki KPKNL Manado adalah sebagai berikut:

I. Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengelolaan kekayaan negara meliputi pelaksanaan tugas berupa pelayanan inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan dan pengamanan kekayaan negara. Pengertian pendayagunaan kekayaan negara meliputi analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara termasuk di dalam analisis tersebut adalah penentuan nilai dari kekayaan negara. Pendayagunaan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) adalah optimalisasi penggunaan barang hasil APBN/perolehan sah yang sedang tidak digunakan untuk tugas pokok dan fungsi instansi (*idle*) agar memberikan manfaat ekonomi (PNBP) maupun sosial, tanpa memindahkan kepemilikan.

Pelaksanaan penilaian kekayaan negara dilakukan terhadap Barang Milik Negara yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peran strategis yang disandang dalam tugas pengelolaan kekayaan negara akan diwujudkan sehingga tujuan kekayaan negara yang dikelola secara efektif dan efisien dan didayagunakan serta dilakukan pengamanan yang optimal dapat tercapai, adalah :

- Menghilangkan high operational cost.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengharmonisasikan ketentuan perundangan kekayaan negara antar sektor.
- Mengetahui jumlah, keberadaan dan besaran nilai riil kekayaan negara.
- Tersusunnya Neraca Kekayaan Pemerintah dan Neraca Kekayaan Negara.
- Optimalisasi pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengatur pengurusan terhadap kekayaan negara, baik yang existing maupun disposal.
- Menghindari dispute antara instansi/unit pengelola kekayaan negara.
- Melakukan dan penilaian kekayaan negara sesuai dengan prinsip The Highest and The Best Use.

II. Pengurusan Piutang Negara

Piutang negara yang dikelola oleh KPKNL Manado adalah piutang yang sudah dikategorikan macet yang diserahkan baik oleh instansi pemerintah pusat/lembaga maupun Instansi Pemerintah Daerah maupun lembaga *Sui Generis* baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul karena perjanjian, peraturan perundang-undangan maupun sebab apapun yang pengelolannya diserahkan pada KPKNL Manado.

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan anatara lain melalui penagihan dan penyelesaian baik melalui lelang maupun di luar lelang. Hasil dari pengurusan piutang negara ini tentunya akan dikembalikan kepada penyerah piutangnya yang kemudian dapat disalurkan kembali pada masyarakat sebagai dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian.

III. Pelayanan Lelang

Transaksi penjualan melalui lelang memberikan keuntungan bagi masyarakat ataupun instansi-instansi yang membutuhkan yang mungkin berbeda dari sisi keperluan. Bagi masyarakat, penjualan melalui lelang memberikan jaminan kepastian hukum atas barang- barang yang dibeli serta mendapatkan transaksi yang transparan dan efisien karena membebaskan biaya yang rendah, sedangkan bagi instansi atau badan-badan usaha yang dilayani memberikan media untuk menindaklanjuti proses pengelolaan aset mereka secara transparan.

IV. Kontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang diberikan memberikan kontribusi yang tidak sedikit jumlahnya dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan tersebut berasal dari Biaya Administrasi (BIAD) pengurusan piutang negara dan Bea lelang yang didapatkan dari pemberian pelayanan lelang. Peningkatan dalam kinerja pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan negara.

4. Sistematika Laporan

Kata Pengantar	Pernyataan singkat Kepala KPKNL Manado tentang ringkasan capaian, konteks strategis, dan penghargaan kepada pemangku kepentingan.
Bab I	Pendahuluan
	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issues</i>) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:
A.	Latar Belakang
	Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.
B.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
	1. Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini dalam PMK 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

	2. Dalam subbab ini menguraikan data sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit organisasi.
	C. Peran Strategis
	Menguraikan mandat dan peran strategis yang diemban oleh organisasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan di luar peraturan organisasi dan tata laksana, maupun peran organisasi secara langsung dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
	D. Sistematika Laporan
	Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.
	E. Permasalahan Utama (Strategic Issue)
	Menguraikan kendala dan permasalahan yang dihadapi organisasi
Bab II	Perencanaan Kinerja
	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:
	A. Perencanaan Strategis
	Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra dan prioritas nasional dengan memperhatikan informasi tematik APBN.
	B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
	Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2025, termasuk penjelasan tentang adendum PK.
	C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
	Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2026, yang telah mempertimbangan amanat yang tercantum dalam rancangan renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2026.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja
	A. Capaian Kinerja Organisasi
	Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
	1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini
	2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025; b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
	3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.
	4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya


	<p>5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja</p> <p>6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;</p> <p>7. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI), misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.</p> <p>8. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwaju dan Program Prioritas Presiden.</p> <p>9. Rencana aksi ke depan.</p>
	<p>B. Realisasi Anggaran</p> <p>Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.</p>
	<p>C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</p> <p>Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2025 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.</p>
	<p>D. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkahlangkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.</p>
Bab IV	Penutup
	<p>1. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.</p> <p>2. Bagi unit kerja yang terdampak PMK 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan perlu menyampaikan <i>history</i> kinerja yang sebelumnya berada pada unit lama.</p>
Lampiran	1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025

	2) Perjanjian Kinerja Tahun 2026
	3) Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025

5. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja tahun 2025, KPKNL Manado menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, beberapa diantaranya adalah:

1. Terdapat perbedaan pengukuran terkait penyelesaian program sertifikasi antara KPKNL dan BPN. Penyelesaian sertifikasi BMN pada BPN diakui ketika sertipikat telah terbit, sedangkan pada KPKNL ketika telah dilakukan validasi pada aplikasi SIMAN. Sementara itu terdapat kendala satuan kerja yang belum mendapatkan sertipikat karena kendala teknis maupun non teknis, sehingga BPN bisa menghitung sebagai capaian sedangkan pada KPKNL belum dapat dihitung sebagai capaian.
2. Meningkatnya harga emas yang sangat signifikan di tahun lalu serta transisi posisi PT. Pegadaian (Persero) sebagai Bank Emas berpengaruh pada perubahan kebijakan internal PT Pegadaian (Persero) dalam pelaksanaan lelang barang gadai yang berupa emas, sehingga membawa dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan capaian IKU PNBPN dan Pokok Lelang, sehingga perlu evaluasi kembali terkait target Pokok Lelang Pegadaian.
3. Alur kerja seiring dengan terbitnya KMK 375 Tahun 2025 tentang Pedoman penentuan Nilai Taksiran BMN Selain Tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor oleh panitia penaksir masih belum terdapat prosedur verifikasi hasil taksiran oleh panitia penaksir.
4. Seiring dengan peningkatan beban dan kompleksitas tugas KPKNL Manado, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki KPKNL Manado perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas antara lain dengan mengikuti diklat/penyegaran atau in house training sehingga dapat selalu *up to date* dengan kebijakan atau teknologi yang semakin berkembang dan bertambah;
5. Permohonan Lelang dari pemohon naik sangat signifikan namun tingkat keterlaksanaan lelang tidak sebanding dengan permohonan.

A stylized graphic of a running stick. The stick is blue and curved, with a green base. The background is divided into three horizontal bands: white at the top, yellow in the middle, and orange at the bottom. The stick is positioned vertically, with the blue part in the white band, the green part in the orange band, and the yellow band in between.

Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.



02.

Rencana Kinerja

1. Perencanaan Strategis
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran DJKN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra DJKN memperhatikan beberapa hal. Aspek yang menjadi perhatian antara lain adalah perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan pada perekonomian nasional patut diwaspadai berpengaruh pada penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, DJKN sebagai Pengelola Barang dituntut untuk mampu mengelola kekayaan negara secara optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan negara dikelola optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi anggaran, mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan tentunya memberikan manfaat dan dampak sosial bagi masyarakat. Selain itu, DJKN harus mampu menekan dampak kerugian keuangan negara akibat bencana yang menyebabkan kerusakan BMN melalui penerapan kebijakan pengasuransian BMN yang efektif. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Renstra DJKN Tahun 2025-2029 telah merumuskan strategi strategi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DJKN dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini.

I. Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Visi DJKN Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

II. Misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, DJKN menerapkan nilai-nilai Kemenkeu yang menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu termasuk DJKN dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312 Tahun 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

III. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

IV. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.	Aset negara tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah atau memberikan manfaat ekonomi	a. Identifikasi dan evaluasi BMN underutilized. b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN.	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL.
2.	Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.	Penyelesaian layanan penilaian melebihi norma waktu.	a. Penerapan Daftar Tarif Pokok Sewa. b. Kaji ulang	Dit. Penilaian, Kanwil DJKN, dan

			laporan penilaian. c. Penguatan pembinaan pada Kanwil dan KPKNL.	KPKNL
3.	Layanan lelang yang modern dan terpercaya.	Aplikasi Lelang mengalami gangguan yang dapat menghambat proses lelang.	a. Identifikasi dan evaluasi gangguan pada Aplikasi Lelang. b. Memperkuat keandalan sistem database.	Dit. Lelang dan Dit. TSI
4.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.	Penguatan integritas pelaksanaan tugas belum dapat mencegah perilaku fraud.	a. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk semua pegawai terkait kode etik, potensi risiko pungli, dan tindak pidana korupsi. b. Pemetaan dan penyesuaian Risiko dengan Proses Bisnis yang dituangkan pada RCM. c. Pemantauan atas risiko pegawai oleh UKI.	Setditjen
		Pengelolaan Sumber Daya Organisasi belum optimal.	a. Peningkatan kualitas perencanaan penataan postur SDM dan kompetensi SDM. b. Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi serta rasionalisasi struktur Organisasi.	Setditjen

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan yang memuat komitmen kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia. Di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), penyusunan Perjanjian Kinerja menjadi bagian integral dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan setiap awal tahun anggaran sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan strategis, mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan, hingga peta strategi organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis organisasi dengan target kinerja unit kerja dan individu, sehingga tercipta keselarasan (*alignment*) dari level kementerian hingga unit operasional.

Langkah-langkah Penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkup DJKN sebagai berikut:

1. *Refinement* dan *Review*

Penyesuaian IKU (Indikator Kinerja Utama) berdasarkan capaian tahun sebelumnya untuk meningkatkan kualitas kinerja.

2. *Cascading* dan *Alignment*

Penjabaran sasaran strategis dari pimpinan tertinggi ke bawahan secara bertingkat untuk memastikan keselarasan, sering kali melalui *one-on-one meeting*.

3. Prinsip SMART-C

IKU yang disusun harus memenuhi kriteria *Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Agreeable* (disepakati), *Realistic* (realistis), *Time Bounded* (batas waktu), dan *Controllable* (dapat dikendalikan).

4. Kualitas Komitmen Kinerja

Membandingkan bobot IKU dengan standar untuk menetapkan target, minimal 5 IKI untuk pejabat fungsional/pengawas dan 3 IKI untuk pelaksana.

5. Penandatanganan Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja disepakati dan ditandatangani oleh pegawai dengan atasan langsung pada awal tahun.

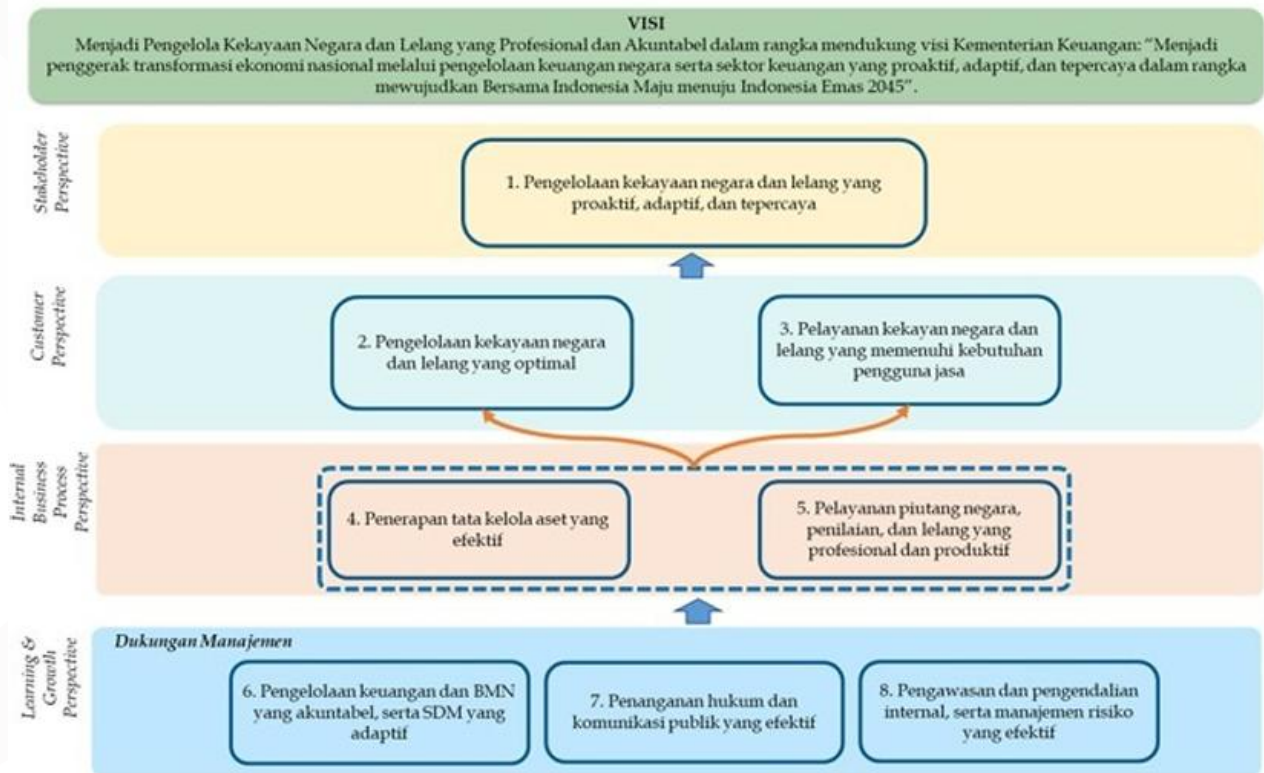
Di lingkungan DJKN, Perjanjian Kinerja disusun secara berjenjang (*cascading*), dimulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga level unit vertikal, seperti Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penjabaran tersebut diwujudkan melalui Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three, yang memuat indikator kinerja utama (IKU), target, serta rencana aksi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit. Setiap Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang terukur, serta program dan kegiatan pendukung. Penetapan indikator dilakukan dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) agar kinerja dapat dimonitor, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara objektif. Selanjutnya, capaian atas Perjanjian Kinerja dipantau secara berkala melalui mekanisme pelaporan dan reuview kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial serta perbaikan berkelanjutan.

Pencapaian Perjanjian Kinerja dan langkah serta hasil yang dicapai merupakan tolok ukur keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau sesuai mandat yang diemban sehingga setiap langkah yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

I. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a. Peta Strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado Tahun 2025

Peta Strategi KPKNL Manado pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Peta strategi tersebut disusun untuk menerjemahkan visi misi KPKNL Manado dalam rangka pencapaian program programnya. Peta strategi Kemenkeu-Three terdiri dari 4 (empat) prespective yaitu:

1. *Stakeholder prespective*

Perspektif yang berkaitan dengan *stakeholder* KPKNL untuk mengetahui kinerja KPKNL Manado yang paling utama/pokok. Stakeholder prespective terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

2. *Customer Prespective*

Perspective yang berorientasi kepada pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Manado adalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna jasa. Customer perspective terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa, Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal, dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.

3. *Internal business process prespective*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada customer dan stakeholder. Internal process prespective terdiri dari Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif, Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif, dan Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.

4. *Learning and growth perspective*

Merupakan sumber daya internal KPKNL Manado yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, Pengelolaan keuangan yang akuntabel, Komunikasi publik yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

b. Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja KPKNL Manado adalah merupakan kontrak kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalu dan Kepala KPKNL Manado. Kontrak Kinerja tersebut merupakan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPKNL. Adapun Penetapan Perjanjian Kinerja KPKNL Manado Tahun 2025 meliputi:

1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran Strategis adalah sasaran yang bersifat penting, strategis, dan memperoleh prioritas yang tinggi, dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Adapun Sasaran Strategis (SS) Kemenkeu-Three KPKNL Manado berjumlah 8 (delapan) SS, yaitu:

- i. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya
- ii. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
- iii. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
- iv. Penerapan tata kelola aset yang efektif
- v. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
- vi. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif
- vii. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
- viii. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

2. Indikator Kinerja Utama

Dalam pencapaian sasaran strategis (SS) telah ditetapkan indikator atau ukuran yang dipakai untuk mengukur pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditentukan yang dikenal dengan Indikator Kinerja utama (IKU). Adapun IKU Kemenkeu Three yang ditetapkan pada tahun 2025 berjumlah 20 (dua puluh) IKU yaitu :

- i. Indeks integritas
- ii. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
- iii. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
- iv. Persentase realisasi pokok lelang
- v. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara
- vi. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
- vii. Indeks kepuasan pengguna layanan
- viii. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan
- ix. Persentase evaluasi kinerja BMN
- x. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara
- xi. Tingkat kualitas layanan penilaian

- xii. Persentase produktivitas Lelang
- xiii. Indeks kualitas kinerja anggaran
- xiv. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
- xv. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
- xvi. Indeks penanganan permasalahan hukum
- xvii. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)
- xviii. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko
- xix. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
- xx. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM

Penetapan Kinerja tersebut telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai KPKNL Manado sebagai bentuk penyelarasan pemahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan target kinerja organisasi. Dengan demikian, setiap pegawai memiliki peran aktif dan tanggung jawab dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2025 disusun secara lebih fokus, terarah, dan terukur, serta telah mengakomodasi dinamika perubahan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Manado. Hal ini merupakan wujud komitmen kuat dalam menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

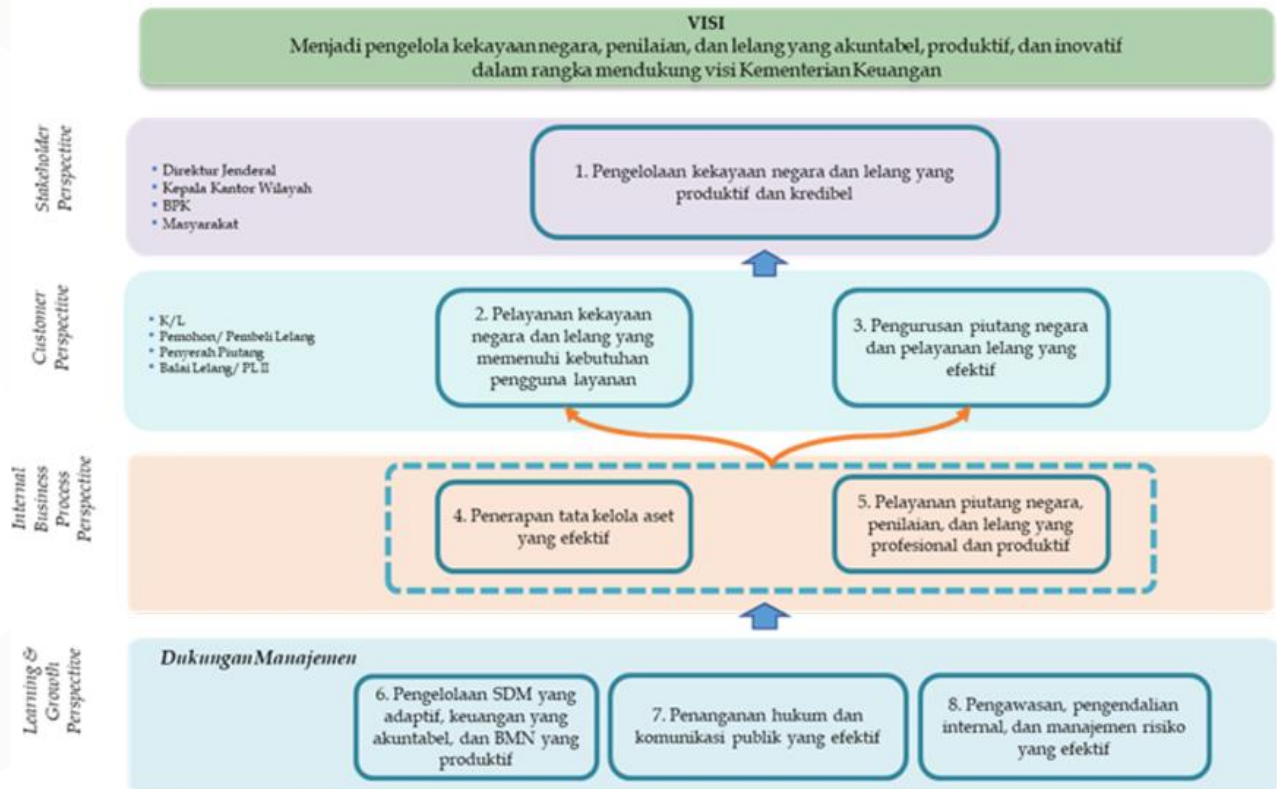
c. Adendum Perjanjian Kinerja

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor ND-3485/KN.1/2025 tanggal 24 Oktober 2025 hal Penetapan Perubahan Target dan Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kinerja Organisasi di Lingkungan DJKI Periode Triwulan IV Tahun 2025, KPKNL Manado mengajukan adendum atas indikator Kinerja Utama Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, mengingat realisasi capaian s.d Triwulan III sudah melampaui trajektori target tahunan.

II. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

a. Peta Strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado Tahun 2026

Peta Strategi KPKNL Manado pada tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Peta strategi tersebut disusun untuk menerjemahkan visi misi KPKNL Manado dalam rangka pencapaian program programnya. Peta strategi Kemenkeu-Three terdiri dari 4 (empat) prespective yaitu:

1. *Stakeholder prespective*

Perspektif yang berkaitan dengan *stakeholder* KPKNL untuk mengetahui kinerja KPKNL Manado yang paling utama/pokok. Stakeholder prespective terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

2. *Customer Prespective*

Perspective yang berorientasi kepada pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Manado adalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna jasa. Customer perspective terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa, Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal, dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.

3. *Internal business process prespective*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada customer dan stakeholder. Internal process perspective terdiri dari Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif, Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif, dan Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.

4. *Learning and growth perspective*

Merupakan sumber daya internal KPKNL Manado yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Learning and growth perspective terdiri dari Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, Pengelolaan keuangan yang akuntabel, Komunikasi publik yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

b. Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja KPKNL Manado adalah merupakan kontrak kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalu dan Kepala KPKNL Manado. Kontrak Kinerja tersebut merupakan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPKNL. Adapun Penetapan Perjanjian Kinerja KPKNL Manado Tahun 2024 meliputi:

1. Sasaran Strategi (SS)

Sasaran Strategis adalah sasaran yang bersifat penting, strategis, dan memperoleh prioritas yang tinggi, dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Adapun Sasaran Strategis (SS) Kemenkeu-Three KPKNL Manado berjumlah 8 (delapan) SS, yaitu:


- i. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel
- ii. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan
- iii. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif
- iv. Penerapan tata kelola aset yang efektif
- v. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
- vi. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif
- vii. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
- viii. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif.

2. Indikator Kinerja Utama

Dalam pencapaian sasaran strategis (SS) telah ditetapkan indikator atau ukuran yang dipakai untuk mengukur pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditentukan yang dikenal dengan Indikator Kinerja utama (IKU). Adapun IKU Kemenkeu Three yang ditetapkan pada tahun 2025 berjumlah 20 (dua puluh) IKU yaitu :

- i. Indeks kepuasan pengguna layanan
- ii. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
- iii. Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah
- iv. Tingkat efektivitas pembinaan
- v. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara
- vi. Persentase realisasi kinerja lelang
- vii. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
- viii. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan
- ix. Persentase evaluasi kinerja BMN
- x. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

- xi. Tingkat kualitas layanan penilaian
- xii. Persentase produktivitas Lelang
- xiii. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
- xiv. Indeks kualitas kinerja anggaran
- xv. Indeks pengelolaan kearsipan
- xvi. Indeks efektivitas komunikasi publik
- xvii. Indeks penanganan permasalahan hukum
- xviii. Indeks integritas organisasi
- xix. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
4. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memerlukan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan selama tahun berjalan serta pencapaian sasaran dan tingkat kinerja yang diinginkan. Evaluasi terhadap kegiatan serta kinerja yang dihasilkan tersebut dilakukan dengan pengukuran atas indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Three untuk mengetahui tingkat pencapaiannya serta dengan melakukan atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan dan mencapai kinerja yang diharapkan.

Adapun Capaian Kinerja IKU Kemenkeu-Three KPKNL Manado Tahun 2025 dapat dilihat pada ikhtisar berikut:

No	SS	IKU	V/C	Uraian IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Nilai kinerja
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	P/L	Indeks integritas	100%	105,32%	105,32%	105,32%
		1b-CP	P/M	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	117,92%	117,92%	117,92%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	P/M	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	120,34%	120,34%	120%
		2b-CP	P/M	Persentase realisasi pokok lelang	100%	82,75%	82,75%	82,75%
		2c-CP	P/M	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	205,26%	205,26%	120%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	P/M	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	77%	96,38%	125,17%	120%
		3b-N	P/M	Indeks kepuasan pengguna layanan	74%	95,30%	128,79%	120%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	P/M	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	167,96%	167,96%	120%
		4b-CP	P/M	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120,00%	120,00%	120,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	P/M	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	122,04%	122,04%	120%
		5b-CP	P/M	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	112,63%	160,90%	120%
		5c-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	80%	116,10%	145,13%	120%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	P/M	Indeks kualitas kinerja anggaran	100%	120,00%	120,00%	120,00%
		6b-N	P/M	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100%	120,00%	120,00%	120,00%
		6c-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98,00%	122,50%	120%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	P/M	Indeks penanganan permasalahan hukum	100%	114,08%	114,08%	114,08%

8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	7b-N	P/M	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80%	112,75%	140,94%	120%
		8a-N	P/M	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80%	97,07%	121,34%	120%
		8b-N	P/M	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	190,63%	200,03%	120%
		8c-N	P/M	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	120,00%	120,00%	120,00%
NKO								115,59%

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 tersebut, KPKNL Manado memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,59 %. Secara keseluruhan, ini merupakan prestasi yang sangat baik yang berhasil dicapai oleh KPKNL Manado. Dari 20 (dua puluh) IKU yang telah ditetapkan, sebanyak 19 (sembilan belas) IKU sudah berhasil melampaui target yang ditetapkan atau masuk kategori hijau, sedangkan 1 (satu) IKU mendapatkan kategori kuning yaitu IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang.

Terdapat 8 (delapan) sasaran strategis (SS) yang telah ditetapkan dan untuk mencapai SS tersebut telah ditetapkan 20 (dua puluh) IKU yang merupakan fokus dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat diukur tingkat keberhasilannya. Evaluasi dan pengukuran atas pencapaian kinerja juga terus dilakukan tiap bulannya dalam bentuk dialog kinerja organisasi untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berakibat pada pencapaian sasaran yang dikehendaki atau tidak. Evaluasi dan monitoring atas pencapaian kinerja adalah dari 20 (dua puluh) IKU yang telah ditetapkan, hanya terdapat 1 (satu) IKU yang realisasinya tidak sesuai target.

Secara rinci, evaluasi terhadap capaian kinerja KPKNL Manado Tahun 2025 (8 SS dan 20 IKU) sebagaimana tabel sebagai berikut:

K-Three	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							PoI/KP
	1a-CP Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Max/TLK
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	100%	100%	133%	133%	105%	105,32%	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	133,00%	133,00%	105,32%	105,32%	
Nilai Kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	120%	120%	105,32%	105,32%	

Indeks integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Realisasi IKU Indeks Integritas pada KPKNL Manado adalah mencapai 105,32% dari target yang ditentukan.

K-Three	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	129%	129%	129%	113%	113%	118%	118%	
Capaian	129,12%	129,12%	129,12%	112,57%	112,57%	117,92%	117,92%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	113%	113%	118%	118%	

IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang adalah kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN.

Realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada KPKNL Manado tahun 2025 sebesar 118% atau 118% dari target yang ditentukan sebesar 100%. PNBPN Pengelolaan Aset terdiri dari pemindahtanganan dan pemanfaatan aset BMN. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung dengan beberapa upaya agar target dapat tercapai, antara lain:

- KPKNL Manado telah melakukan pemilahan BMN yang kondisi rusak berat dan berkoordinasi dengan satker untuk penghapusan BMN melalui penjualan lelang;
- Melakukan sosialisasi kepada satker terkait dengan pemanfaatan aset dan mengingatkan kembali kepada satker terkait dengan perjanjian sewa yang habis masa berlakunya;
- KPKNL Manado melaksanakan koordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan capaian PNBPN setiap bulannya;
- Prosentase penerimaan negara di bidang lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I mencapai keberhasilan dengan melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan dengan pemohon lelang khususnya pihak perbankan.

K-Three	SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	50%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	71%	71%	71%	123%	123%	120%	120%	
Capaian	70,95%	70,95%	70,95%	122,64%	122,64%	120,34%	120,34%	
Nilai Kinerja	70,95%	70,95%	70,95%	120%	120%	120%	120%	

Pengelolaan aset yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara dalam bentuk BMN dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Optimalisasi BMN dilaksanakan dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara pada KPKNL Manado tahun 2025 sebesar 122,34% dari target sebesar 100%. Keberhasilan ini disebabkan dengan memperhatikan indikator:

- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal BMN)
- Penguatan peran Pembinaan Pengelolaan BMN oleh Pengelola Barang;
- Pengoptimalan utilisasi BMN;
- Efisiensi belanja modal dan/atau pemeliharaan BMN;
- Pengoptimalan penerimaan Negara dari Pengelolaan BMN;

K-Three	SS. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	123%	123%	123%	76%	76%	83%	83%	
Capaian	123,35%	123,35%	123,35%	75,54%	75,54%	82,75%	82,75%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	75,54%	75,54%	82,75%	82,75%	

Pelaksanaan lelang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya. Selain itu, peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dapat tercapai dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang Lelang.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang merupakan pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa dalam menggunakan kekayaan negara. Realisasi IKU Prosentase realisasi pokok lelang pada KPKNL Manado tahun 2025 adalah sebesar 83% dari target yang ditetapkan. Meskipun realisasi IKU ini meningkat dari tahun sebelumnya, namun capaian lelang pegadaian yang merosot masih mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian target KPKNL Manado di tahun 2025.

K-Three	SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	340%	340%	340%	200%	200%	205%	205%	
Capaian	340,15%	340,15%	340,15%	200,10%	200,10%	205,26%	205,26%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024. Tujuannya Adalah percepatan penurunan saldo piutang Negara pada K/L/Pemda maupun piutang Negara pada badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang sedang diurus PUPN.

Realisasi Persentase Penurunan nilai saldo Piutang Negara pada KPKNL Manado tahun 2025 sebesar 205% dari target 100%. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung dengan beberapa upaya agar target dapat tercapai, antara lain :

- Optimalisasi upaya penagihan, salah satunya dengan menghubungi penanggung

hutang secara intens dan berkoordinasi secara simultan kerjasama dengan beberapa instansi terkait; dan

- Melaksanakan pelitian lapangan, penagihan langsung dengan surat paksa dan penyitaan barang jaminan.

K-Three	SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	97%	97%	205%	205%	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	96,61%	96,61%	205,26%	205,26%	
Nilai Kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	96,61%	96,61%	120%	120%	

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan KPKNL Manado kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman proses bisnis KPKNL Manado kepada pengguna layanan.

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada KPKNL Manado tahun 2025 sebesar 205,26% dari target yang ditentukan sebesar 74%. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung dengan beberapa upaya agar target dapat tercapai, antara lain:

- Edukasi terkait pengelolaan piutang negara (meliputi penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban)
- Edukasi terkait pengurusan piutang macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik
- Edukasi terkait layanan lelang yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal

Untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.

K-Three	SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	Max/TLK
Realisasi	95%	95%	95%	96%	96%	96%	96%	
Capaian	95,13%	95,13%	95,13%	96,24%	96,24%	96,38%	96,38%	
Nilai Kinerja	95,13%	95,13%	95,13%	96,24%	96,24%	96,38%	96,38%	

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan oleh KPKNL Manado. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan KPKNL Manado dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan dari IKU ini Adalah untuk meningkatkan layanan pada KPKNL Manado secara keberlanjutan. Selain itu, IKU ini juga mengandung unsur layanan yang inklusif, salah satunya terkait sarana dan prasarana kelompok rentan. Realisasi capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada

KPKNL Manado tahun 2025 sebesar 96% dari target yang telah ditentukan.

K-Three	SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	5%	5%	5%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	9%	9%	9%	76%	76%	168%	168%	
Capaian	8,56%	8,56%	8,56%	75,69%	75,69%	167,96%	167,96%	
Nilai Kinerja	8,56%	8,56%	8,56%	75,69%	75,69%	120%	120%	

Tujuan dari IKU ini adalah memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, dan mengamankan BMN berupa tanah.

Realisasi capaian Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan pada KPKNL Manado tahun 2025 sebesar 168% dari target. Keberhasilan ini disebabkan antara lain:

- adanya koordinasi yang baik antara KPKNL Manado dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
- Provinsi Sulawesi Utara dan satuan kerja terkait; dan
- adanya optimalisasi dari anggaran persertifikatan BMN pada Kanwil BPN Sulawesi Utara, sehingga optimalisasi tersebut dapat melebihi target.

K-Three	SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	15%	15%	15%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	113%	113%	120%	120%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,92%	112,92%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	113%	113%	120%	120%	

Tujuan dari IKU ini adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Realisasi capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN pada KPKNL Manado Tahun 2025 mencapai nilai 120,00% dari target sebesar 100%. Keberhasilan ini disebabkan:

- adanya koordinasi yang efektif dengan Badan Pusat Statistik sehingga dimudahkan untuk mendapatkan data sumber manfaat sosial;
- adanya koordinasi antara KPKNL dan satuan kerja sehingga memudahkan perolehan data yang diperlukan;
- adanya sinergi antara Seksi PKN dengan Jafung Penilai untuk mendapatkan nilai sewa/manfaat atas BMN tersebut; dan
- adanya timeline yang dibuat sehingga pekerjaan *portofolio* aset mencapai target.

K-Three	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	142%	142%	142%	115%	115%	122%	122%	
Capaian	141,60%	141,60%	141,60%	114,54%	114,54%	122,04%	122,04%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	115%	115%	120%	120%	

Tujuan dari IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara adalah percepatan penyelesaian piutang Negara yang diurus oleh PUPN dan piutang Negara yang dikelola oleh K/L/Pemda/badan/lembaga khusus/badan hukum publik.

Realisasi Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara pada KPKNL Manado tahun 2025 adalah sebesar 122% dari target yang telah ditentukan. target ini tercapai melalui pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal dengan total capaian 310 BKPN yang telah diselesaikan.

K-Three	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/TLK
Realisasi	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	
Capaian	113,23%	113,23%	113,23%	112,70%	112,70%	112,63%	112,63%	
Nilai Kinerja	113,23%	113,23%	113,23%	112,70%	112,70%	112,63%	112,63%	

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 48 hari kerja untuk penilaian bisnis
- penilaian yang dilaksanakan paling lama 50 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Realisasi Tingkat Kualitas Layanan Penilaian pada KPKNL Manado tahun 2025 sebesar 113% dari target yang telah ditentukan.

K-Three	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	30%	30%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	69%	69%	69%	96%	96%	116%	116%	
Capaian	69,40%	69,40%	69,40%	96,36%	96,36%	116,10%	116,10%	
Nilai Kinerja	69,40%	69,40%	69,40%	96,36%	96,36%	116,10%	116,10%	

IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian berupa kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara.

Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBPN lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL. Atas target tersebut KPKNL Manado pada tahun 2025 telah mampu menyelesaikan Persentase produktivitas lelang mencapai nilai realisasi sebesar 116% dari target yang telah ditentukan. Keberhasilan yang telah dicapai dikarenakan adanya penggalan potensi lelang khususnya lelang sukarela dan UMKM yang memiliki potensi lelang laku lebih tinggi.

K-Three	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU Indeks kinerja anggaran adalah penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Organisasi. Untuk IKU Indeks kinerja anggaran KPKNL Manado telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00%. Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi adalah sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-KL dan DIPA, tidak termasuk selfblocking, hasil efisiensi, dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (kontijensi).
- Keluaran riil adalah barang/jasa saebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
- Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal, meliputi objek: perjalanan dinas: rapat dalam kantor; konsinyering/paket meeting;

kudapan/makan siang rapat; langganan daya dan jasa; honorarium tim, narasumber, moderator, kepanitiaan lainnya, kecuali untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai yang diselenggarakan oleh BPPK, proses pengadaan barang/jasa; belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja barang operasional/non operasional lainnya. Hasil lebih atau sisa dana dihitung sebagai efisiensi apabila capaian keluaran riil paling sedikit seratus persen.

- Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan belanja modal dengan rencana penarikan dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai: lembar ketiga DIPA; atau RPD revisi pertama; atau RPD revisi pertama setelah APBN-P; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan self-blocking. Keberhasilan yang dicapai disebabkan karena:
 - Adanya sinergi antara Subbagian Umum dengan Seksi Teknis dalam pelaksanaan anggaran;
 - Telah dilaksanakannya perencanaan penarikan dan dari masing-masing subbagian umum dan seksi teknis; dan
 - Telah dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi capaian IKU PKPA setiap bulan.

K-Three	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tujuan dari IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk mengetahui BMN yang produktif. IKU ini mengukur dua komponen, yaitu:

Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan

Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Realisasi IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada KPKNL Manado Tahun 2025 mencapai 120% dari target sebesar 100%.

K-Three	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	20%	20%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	23%	23%	23%	86%	86%	98%	98%	
Capaian	23,38%	23,38%	23,38%	86,00%	86,00%	98,00%	98,00%	
Nilai Kinerja	23,38%	23,38%	23,38%	86,00%	86,00%	98,00%	98,00%	

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian

Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI/IPR. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan pelatihan berdasarkan kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Pengembangan Kompetensi Pegawai ini mengukur dua komponen, yaitu:

- Jam pelatihan pegawai telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

- Pemenuhan pemanggilan pelatihan yang didasari oleh proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025.

Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Manado tahun 2025 adalah sebesar 98% dari target yang ditentukan sebesar 80% dengan total 29 pegawai yang telah memenuhi JP dan panggilan pelatihan.

K-Three	SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	116%	116%	116%	116%	116%	114%	114%	
Capaian	115,75%	115,75%	115,75%	115,61%	115,61%	114,08%	114,08%	
Nilai Kinerja	115,75%	115,75%	115,75%	115,61%	115,61%	114,08%	114,08%	

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi KPKNL Manado baik litigasi maupun non litigasi.
- Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap atas perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara, dan Mahkamah Agung, putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Realisasi Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada KPKNL Manado tahun 2025 adalah sebesar 114% dari target yang ditentukan sebesar 100%.

K-Three	SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							PoI/KP
	7b-CP Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	115%	115%	115%	112%	112%	113%	113%	
Capaian	115,00%	115,00%	115,00%	111,67%	111,67%	112,75%	112,75%	
Nilai Kinerja	115,00%	115,00%	115,00%	111,67%	111,67%	112,75%	112,75%	

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan.

Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Serta Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Perhitungan IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2025 dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen, yaitu:

- Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
- Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik; dan
- Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website.

K-Three	SS. 8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	98%	98%	98%	96%	96%	97%	97%	
Capaian	98,23%	98,23%	98,23%	95,79%	95,79%	97,07%	97,07%	
Nilai Kinerja	98,23%	98,23%	98,23%	95,79%	95,79%	97,07%	97,07%	

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

K-Three	SS. 8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	76%	76%	76%	90%	90%	95%	95%	Max/TLK
Realisasi	119%	119%	119%	191%	191%	191%	191%	
Capaian	118,75%	118,75%	118,75%	190,63%	190,63%	190,63%	190,63%	
Nilai Kinerja	118,75%	118,75%	118,75%	120%	120%	120%	120%	

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari pengawas Internal. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa:

- Rekomendasi Policy Recommendation adalah langkah tindak yang disampaikan secara tertulis oleh Inspektur Jenderal atau Inspektur atas nama Inspektur Jenderal kepada Sekjen/Dirjen/Kepala Badan untuk mengubah peraturan/keputusan/ketentuan yang sudah ada dan/atau membuat peraturan/keputusan/ ketentuan baru;

- Rekomendasi Hukuman Disiplin adalah rekomendasi hukuman disiplin berdasarkan Laporan Audit Investigasi Itjen atau Tim PP94; dan
- Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*.

K-Three	SS. 8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	120%	120%	120%	120%	

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka peningkatan kinerja KPKNL Manado pada setiap tahunnya, komponen-komponen sasaran strategis dan indikatornya dievaluasi untuk disempurnakan lagi, untuk itu SS dan IKU pada setiap tahun dapat berbeda, baik jumlah maupun nama indikatornya. Capaian kinerja KPKNL Manado dibandingkan antara SS, IKU dan NKO tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	134,10%	130,57%	115,65%	98,97%	117,92%
2	Indeks integritas			89,17	92,44	105,32%
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	84,42%	81,00%	81,64%	87,59%	
4	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	100,00%	100,00%	100%	100%	
5	Persentase realisasi pokok lelang	184,22%	152,53%	105,50%	69,63%	83%
6	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	137,00%	132,06%	264,40%	286,82%	
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian				107,92	
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	105,17%	113,16%	121,98%	316,42%	168%

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
9	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	111,11%	120,68%	120,00%	120,00%	
10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara				57,85%	
11	Persentase produktivitas lelang	36,93%	55,47%	105%	120,00%	116,10%
12	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	
13	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120,00%	120,00%		113,50%	98,00%
14	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko			98,62	98,43	
15	Indeks kualitas kinerja anggaran				120,00%	120,00%
16	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
17	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)				100	112,75%
18	Indeks efektivitas UKI				97,9	
19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti				100,00%	
20	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,81	4,83			95,30%
21	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	98,63				
22	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara		120,00%	101,19%		122,04%
23	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100,00%				
24	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien			91,4		
25	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	100,00%	100,00%	100%		
26	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	93,2	95			96,38%
27	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,52	96,97	95,85		
28	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		219,25%	120%		
29	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			97,07		
30	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	94,27		90		
31	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	88	93,87			

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
32	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	98,13	99,18			
33	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,52%	96,97			
35	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara					120,34%
36	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara					205,26%
40	Persentase evaluasi kinerja BMN					120,00%
42	Tingkat kualitas layanan penilaian					112,63%
44	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa					120,00%
45	Indeks penanganan permasalahan hukum					114,08%
46	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko					97,07%
47	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti					190,63%
48	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM					120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		113,64%	116,07%	113,34%	111,65%	115,59%

IKU yang digunakan secara berkelanjutan menunjukkan dinamika kinerja yang fluktuatif, baik peningkatan maupun penurunan. Antara 2024 dan 2025 tampak peningkatan signifikan pada beberapa IKU seperti persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang naik dari 98,97% menjadi 117,92%, Indeks Integritas naik dari 92,44% menjadi 105,32% di tahun 2025, persentase realisasi pokok Lelang dari 69,63% di tahun 2024 naik menjadi 83% di tahun 2025. Selain itu, Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) meningkat dari 100% menjadi 112,75%. Dampak kumulatif dari perbaikan pada beberapa IKU tercermin pada NKO yang melonjak dari 111,65% di tahun 2024 menjadi 115,59% di tahun 2025.

Namun demikian, terdapat indikator yang mengalami penurunan yang perlu mendapat perhatian. Seperti persentase BMN berupa tanah yang disertipatkan dari 316,42% mengalami penurunan menjadi 168% di tahun 2025, persentase produktivitas Lelang menurun dari 120% menjadi 116,10%, serta persentase pengembangan kompetensi pegawai dari 113,50% di tahun 2024 menjadi 98% di tahun 2025.

Pada tahun 2024 terdapat sejumlah indikator kinerja utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi, namun tidak lagi digunakan pada tahun 2025. Indikator tersebut meliputi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara, persentase penurunan outstanding piutang negara, indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian, persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset), persentase saldo berkas kasus piutang negara, deviasi ketergunaan hasil penilaian, indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko, deviasi

data PNBP fungsional DJKN, indeks efektivitas UKI, serta persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti. Tidak dilanjutkannya indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kerangka pengukuran kinerja pada tahun 2025 melalui penyederhanaan indikator dan penguatan fokus pada pengukuran kinerja yang lebih berorientasi pada hasil dan dampak strategis.

Sebaliknya, pada tahun 2025 terdapat beberapa indikator kinerja utama yang kembali digunakan setelah sebelumnya diterapkan pada periode 2021–2023, dengan disertai penyesuaian komponen penilaian. Indikator tersebut mencakup persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan, persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara, indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, serta indeks kepuasan pengguna layanan. Penggunaan kembali indikator-indikator tersebut dilakukan dengan penyempurnaan definisi operasional, metode pengukuran, dan ruang lingkup penilaian agar lebih relevan dengan dinamika kebijakan serta kebutuhan organisasi. Penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan pengukuran kinerja sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas capaian kinerja organisasi.

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	NKO
2021	12	22	113,64%
2022	11	21	116,07%
2023	9	20	113,34%
2024	11	19	111,65%
2025	8	20	115,59%

Kenaikan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari 111,65% pada tahun 2024 menjadi 115,59% pada tahun 2025 mencerminkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Capaian tersebut menunjukkan semakin terarah dan efektifnya penetapan serta pelaksanaan sasaran kinerja organisasi. Peningkatan NKO pada tahun 2025 juga didukung oleh tidak ditemukannya IKU dalam kategori merah, serta dari total 20 Indikator Kinerja Utama yang dinilai, hanya 1 IKU yang berada pada kategori kuning, sementara indikator lainnya telah mencapai kategori hijau.

2. Realisasi Anggaran

Anggaran operasional yang telah ditetapkan (Pagu DIPA) Tahun 2025 untuk KPKNL Manado sebesar Rp2.736.734.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai : Rp 0,00
- b. Belanja Barang : Rp1.796.946.000,00
- c. Belanja Modal : Rp 939.788.000,00

Dari ketersediaan dana tersebut, dapat dilihat realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut:

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	Rp0,00	Rp1.796.946.000,00	Rp939.788.000,00	Rp2.736.734.000,00
Realisasi	Rp0,00	Rp1.768.877.318,00	Rp924.111.187,00	Rp2.692.988.505,00
Persentase	0%	98,44%	98,33%	98,40%
Sisa	Rp0,00	Rp28.068.682,00	Rp15.676.813,00	Rp43.745.495,00

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja, sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	9.468.000,00	9.468.000,00	100,00	0,00
Pengelolaan Aset	455.699.000,00	441.127.015,00	96,80	14.571.985,00
Legislasi dan Litigasi	69.324.000,00	69.317.533,00	99,99	6.467,00
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.172.686.000,00	2.145.548.457,00	98,75	27.137.543,00
Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	17.992.000,00	16.197.500,00	90,03	1.794.500,00
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	11.565.000,00	11.330.000,00	97,97	235.000,00

Untuk belanja pegawai pada KPKNL Manado tahun 2025 dilaksanakan secara terpusat oleh Kantor Pusat DJKN, dan pada tahun anggaran 2025 KPKNL Manado terdapat belanja modal berupa Renovasi 1 unit Rumah Negara Golongan II Tipe B dan belanja Peralatan dan Mesin dengan jumlah 87 unit serta belanja modal berupa Kendaraan Dinas Operasional roda 2 dengan jumlah 2 unit. Anggaran yang disediakan untuk masing-masing kegiatan telah digunakan semaksimal mungkin untuk menunjang terselesaikannya tugas dan pelayanan yang baik kepada stakeholder dan untuk kelancaran operasional kantor.

Pengukuran efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dalam menunjang kinerja KPKNL Manado. Pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja secara umum dapat dikategorikan baik, karena menunjukkan keselarasan antara tingkat penyerapan anggaran dan capaian kinerja pada sebagian besar indikator. Realisasi yang dicapai melebihi target dengan penyerapan anggaran yang tidak melebihi anggaran yang ditargetkan. Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2025:

Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, secara umum kinerja KPKNL Manado berada pada kategori baik, yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat penyerapan anggaran yang terkendali serta capaian kinerja yang memenuhi dan melampaui target pada sebagian besar indikator. Pengukuran ini dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja KPKNL Manado. Perbandingan realisasi anggaran dan capaian kinerja KPKNL Manado Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	7.468.000	7.468.000	100%	80	80	100,00%
2	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	86.761.000	86.457.365	100%	175	532	304,00%
3	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	11.981.000	11.485.500	96%	276	687	248,91%
4	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	81.856.000	81.829.930	100%	821	987	120,22%
5	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	42.460.000	41.073.500	97%	3	3	100,00%
6	Aset BUN yang Dikelola	34.067.000	32.133.000	94%	17	26	152,94%
7	Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara	142.985.000	142.854.220	100%	100	308	308,00%
8	Rekomendasi Kepatuhan Internal	11.565.000	11.330.000	98%	5	32	640,00%
9	Risalah Lelang	45.869.000	35.933.500	78%	400	1167	291,75%
10	Sosialisasi Lelang	2.000.000	2.000.000	100%	40	60	150,00%
11	Kerumahtanggaan	153.153.000	152.308.840	99%	12	12	100,00%
12	Layanan Perkantoran	1.079.745.000	1.069.128.430	99%	12	12	100,00%
13	Peralatan Fasilitas Perkantoran	348.306.000	336.423.044	97%	75	75	100,00%
14	Kendaraan Bermotor	56.000.000	53.390.600	95%	2	2	100,00%
15	Gedung Bangunan	535.482.000	534.297.543	100%	332,5	332,5	100,00%
16	Rekomendasi Hasil Penilaian	9.720.000	9.360.000	96%	2	2	100,00%
17	Layanan Bantuan Hukum	69.324.000	69.317.533	100%	10	14	140,00%
18	Pembinaan/Edukasi Publik	5.292.000	5.040.000	95%	100	140	140,00%
19	Kehumasan	12.700.000	11.157.500	88%	21	26	123,81%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2025, terdapat beberapa bentuk efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

I. Efisiensi sumber daya anggaran

Kegiatan	Pagu (Rp)	Efisiensi (Rp)	%	Sisa (Rp)
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	21.033.000,00	11.565.000,00	54,99	9.468.000,00
Pengelolaan Aset	467.264.000,00	11.565.000,00	2,48	455.699.000,00
Legislasi dan Litigasi	69.324.000,00	0,00	0,00	69.324.000,00
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.632.697.000,00	1.460.011.000,00	40,19	2.172.686.000,00
Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	29.557.000,00	11.565.000,00	39,13	17.992.000,00
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	23.130.000,00	11.565.000,00	50,00	11.565.000,00

Pelaksanaan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui mekanisme pengendalian belanja sejak awal tahun dalam bentuk pemblokiran terhadap sebagian alokasi kegiatan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan pengelolaan anggaran yang mengedepankan prinsip belanja berkualitas (*spending better*), dengan fokus pada prioritas program, efektivitas output, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan negara.

Pada akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2025, dilakukan reviu dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang kemudian diikuti dengan pembukaan blokir secara selektif sesuai tingkat urgensi, kesiapan pelaksanaan kegiatan, dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Namun demikian, tidak seluruh kegiatan memperoleh pembukaan blokir, sehingga realisasi anggaran tetap diarahkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan disiplin fiskal.

Berdasarkan hasil pengendalian tersebut, KPKNL Manado mencatat efisiensi sumber daya anggaran sebesar Rp1.506.271.000,00 atau sebesar 35,50% dari total pagu anggaran Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan penerapan pengelolaan anggaran yang prudent, akuntabel, serta berorientasi pada *value for money*, dengan tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja organisasi.

II. Efisiensi sumber daya manusia

Dinamika pengelolaan sumber daya manusia pada KPKNL Manado selama Tahun 2025 ditandai dengan adanya perubahan komposisi pegawai sebagai konsekuensi dari purnatugas dan mutasi antarunit kerja. Pada bulan April 2025, terjadi pengurangan pegawai sehubungan dengan purnatugas 1 (satu) orang pejabat fungsional Pelelang Muda. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kapasitas pelaksanaan tugas teknis pelelangan yang merupakan salah satu fungsi utama KPKNL.

Selanjutnya, pada bulan Desember 2025, terdapat 3 (tiga) pegawai yang memperoleh Surat Keputusan mutasi ke unit kerja lain. Mutasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan penataan organisasi dan pengembangan karier pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang bertujuan untuk mendorong pemerataan kompetensi, penyegaran organisasi, serta optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia.

Pada periode yang sama, KPKNL Manado juga menerima penambahan 3 (tiga) pegawai berdasarkan Surat Keputusan yang sama, yang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat fungsional Pelelang Pertama dan 2 (dua) orang pegawai pelaksana. Penambahan pegawai tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas operasional maupun administratif, serta menjaga kesinambungan proses bisnis organisasi.

Dengan adanya mutasi keluar dan masuk tersebut, jumlah pegawai secara keseluruhan mengalami penyesuaian. Per akhir Tahun 2025, total sumber daya manusia KPKNL Manado tercatat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, termasuk Kepala Kantor. Kondisi ini menuntut pengelolaan sumber daya manusia yang lebih optimal melalui penataan beban kerja, peningkatan kompetensi, serta penguatan koordinasi dan kerja sama antarpegawai, sehingga pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja tetap dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, perubahan komposisi pegawai tersebut merupakan bagian dari proses adaptasi organisasi dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Manado tetap berjalan secara profesional dan berdaya guna.

4. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) bentuk peningkatan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh KPKNL Manado. Peningkatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Hasil Rekomendasi Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor ND-860/KN.1/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Monitoring Tindak Lanjut dan Rekapitulasi *Pending Matters* Pengawasan Inspektorat Jenderal per 19 Maret 2025, terdapat 3 bentuk temuan pada KPKNL Manado yang telah ditindaklanjuti dengan detail sebagai berikut:

No	Temuan	Tindak Lanjut
1	Serah Terima Belum Didukung dengan Kelengkapan Dokumen Berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas 2 (dua) Rumah Negara	KPKNL Manado sudah melaksanakan pelatihan penyusunan kontrak pada tanggal 20 Februari 2025.
2	Pajak Penghasilan (PPH) Final atas Pembelian Rumah Negara Kurang Dipungut sebesar Rp28.921.014,00	KPKNL Manado telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat konfirmasi ke KPP Pratama Manado melalui Nota Dinas Nomor ND-1203/KNL.1601/2024 tanggal 26 November 2024 hal Permintaan Konfirmasi Penyetoran PPh Final atas Pembelian 6 unit Rumah Negara KPKNL Manado untuk memastikan PPh Final sebesar Rp107.007.750,00 telah disetorkan. KPP Pratama Manado telah merespon melalui Nota Dinas ND-1482/KPP.1601/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Konfirmasi Penyetoran PPh Final atas Pembelian 6 unit Rumah Negara, didapatkan hasil bahwa PPh Final telah disetorkan keseluruhan dan tidak terdapat kekurangan setoran PPh Final.

3	Plat Nama pada 7 (tujuh) Rumah Negara pada KPKNL Manado Belum Terpasang	KPKNL Manado telah menindaklanjuti dengan pemasangan plat identitas rumah negara sesuai dengan standar spesifikasi dan standar jumlah rumah negara pada bulan Desember 2024.
---	---	--

II. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Hasil Rekomendasi Unit Kepatuhan Internal


Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara nomor ND-771/WKN.16/2025 tanggal 4 Juli 2025 hal Hasil Pengawasan/Pemantauan atas Risiko Proses Bisnis Lelang di Lingkup Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Tahun 2025, terdapat 2 bentuk temuan pada KPKNL Manado yang telah ditindaklanjuti dengan detail sebagai berikut:

No	Temuan	Tindak Lanjut
1	Terdapat salah satu peserta pada pelaksanaan lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 27 Desember 2024 merupakan Pegawai Bidang Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk/ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sebagai panitia penjualan lelang Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan ditetapkan sebagai pemenang lelang.	KPKNL Manado telah memberikan himbauan kepada seluruh pemohon lelang khususnya pemohon lelang Barang Milik Daerah, untuk melampirkan daftar nama pegawai dan jabatan pada unit yang menjadi panitia penjualan aset/barang milik daerah yang akan dilelang sehingga Pelelang dapat mengidentifikasi peserta yang dikecualikan dan/atau berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan lelang tersebut.
2	Proses pengembalian uang jaminan lelang oleh bendahara penerima telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi perlu ketelitian dalam melakukan verifikasi serta validasi uang jaminan peserta lelang yang tidak sah.	KPKNL Manado telah melakukan sosialisasi terkait proses bisnis pengembalian uang jaminan lelang agar diketahui oleh pengguna layanan Lelang.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan laporan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, KPKNL Manado menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai dokumen resmi pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Laporan ini merupakan perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara pimpinan dan bawahan pada setiap jenjang organisasi, yang memuat komitmen capaian kinerja selama satu periode tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pertanggungjawaban tersebut mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Manado sebagai instansi vertikal DJKN yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan dan penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, serta penyelenggaraan lelang, sekaligus berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui mekanisme Kontrak Kinerja dan pendekatan *Balanced Scorecard*. Pada Tahun 2025, KPKNL Manado menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang terukur sebagai dasar evaluasi capaian kinerja organisasi. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan hasil yang selaras dengan target yang telah ditetapkan, yang merupakan akumulasi kontribusi dan kinerja seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Manado.

Setiap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara sistematis sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah strategis berikutnya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada layanan pengurusan piutang negara, penyelenggaraan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

Dalam menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, KPKNL Manado menerapkan strategi penetapan prioritas kegiatan dengan memfokuskan pelaksanaan program pada aktivitas yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran kinerja. Strategi tersebut didukung oleh komitmen dan profesionalisme seluruh pegawai untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik dalam pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi sumber informasi manajerial dalam proses pengambilan keputusan, evaluasi, serta peningkatan kinerja organisasi. Melalui dokumen ini, KPKNL Manado berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kualitas pelayanan, serta

menghadirkan peran yang semakin nyata dan profesional sebagai penyelenggara layanan publik di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.



Lampiran





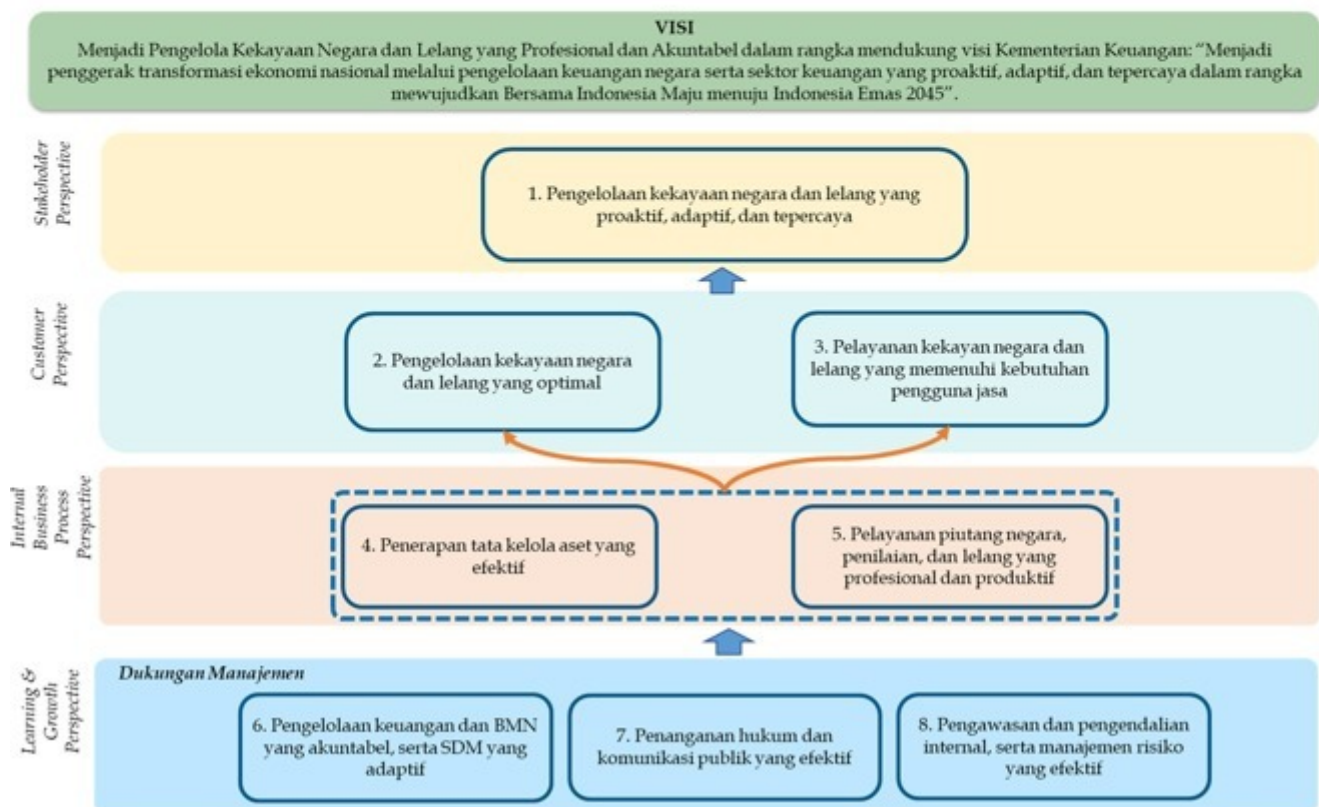
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WKN.16/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MANADO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MANADO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp24,0 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp495,0 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,5 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100



Program/Kegiatan 2025**Anggaran**

Program:

Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif Rp597,644,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp98,774,000
2. Pengelolaan Aset 0,00 Rp498,870,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp2,952,251,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp74,324,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Rp2,824,167,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp30,630,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp23,130,000

Kota Manado, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah,
Gorontalo dan Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
R. Ay. Indriasari Sundoro

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Manado



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suranto



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MANADO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp24,0 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp495,0 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,5 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Manado, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Manado



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suranto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Manado, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suranto



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Adi Suranto		NAMA	R. Ay. Indriasari Sundoro
NIP	19770110 199602 1 001		NIP	19750219 199503 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp24,0 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp495,0 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,5 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Manado, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro
19750219 199503 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suranto
19770110 199602 1 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	29 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp24,0 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp495,0 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,5 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%



	8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									

Kota Manado, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro
19750219 199503 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suranto
19770110 199602 1 001





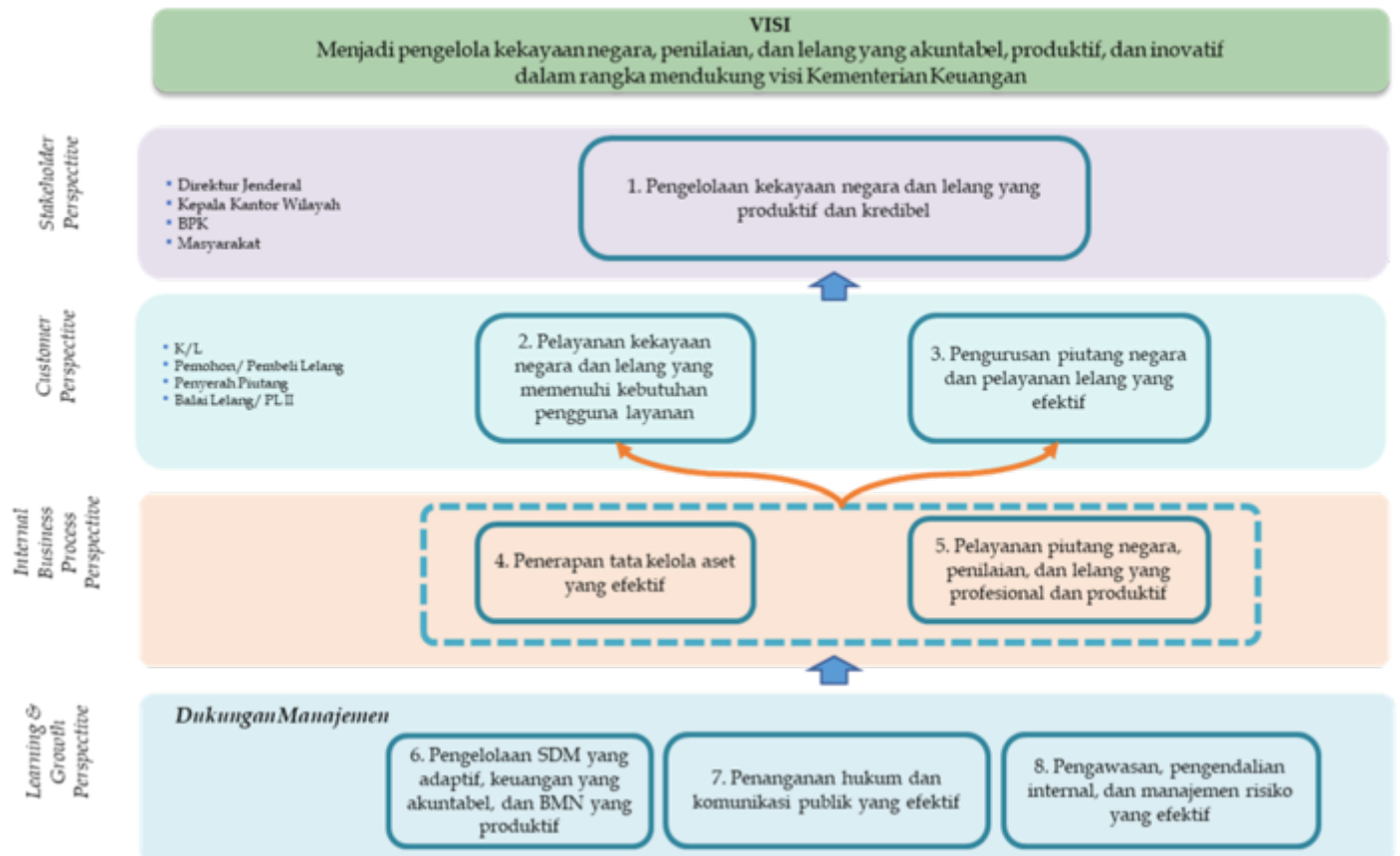
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WKN.16/2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MANADO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MANADO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp16,7 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,5 M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp71,0 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp1,014,219,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp197,924,000
2. Pengelolaan Aset	Rp816,295,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp1,320,507,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp74,324,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,158,300,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp72,207,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp15,676,000

Manado, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah,
Gorontalo dan Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
R. Ay. Indriasari Sundoro

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Manado



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suranto



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MANADO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp16,7 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,5 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp71,0 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Manado, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Manado



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suranto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Manado, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suranto



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Adi Suranto		NAMA	R. Ay. Indriasari Sundoro
NIP	19770110 199602 1 001		NIP	19750219 199503 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp16,7 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,5 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp71,0 M)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Manado, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suranto

19770110 199602 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro

19750219 199503 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	29 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp16,7 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,5 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp71,0 M)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Manado, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro
19750219 199503 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suranto
19770110 199602 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA